

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan residu padat dari aktivitas manusia yang ketersediaannya amat melimpah terutama di perkotaan salah satunya seperti Kota Cirebon, jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik akan memicu serangkaian isu serius mulai dari dampak lingkungan dan kesehatan hingga krisis sosial yang mendalam seperti yang ditunjukkan oleh temuan Michael Edestein dan Abraham Wandersman bahwa batas-batas geografis yang terpolusi oleh limbah atau sampah berperan signifikan dalam proses identifikasi sosial yang secara sesuatu mengarahkan pada pelabelan wilayah tersebut sebagai kawasan kumuh sebuah situasi yang memerlukan implementasi strategi pengelolaan sampah yang tepat mengingat konteks Indonesia yang menduduki peringkat sebagai salah satu dari lima negara penghasil sampah plastik terbesar global di mana dampak buruknya sudah meluas dalam bentuk pencemaran terhadap sungai dan lautan, kerusakan ekosistem yang rapuh, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang dihasilkan dari polusi udara dan air yang diakibatkan oleh praktik-praktik seperti pembakaran sampah yang tidak terkontrol.

Sampah yang berserakan di pinggir jalan adalah bentuk pencemaran lingkungan yang merusak keindahan, menyebabkan bau tidak sedap, serta menimbulkan masalah kesehatan dan banjir. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air, menjadi sarang penyakit bagi nyamuk dan tikus, serta membahayakan ekosistem di sekitarnya.

Dampaknya sangat luas, mulai dari pencemaran sungai dan lautan, kerusakan ekosistem, hingga kesehatan manusia yang terancam akibat polusi udara dan air yang dihasilkan oleh pembakaran sampah. Pengelolaan sampah di

banyak kawasan, termasuk secara signifikan di Indonesia, masih teridentifikasi sebagai isu yang kompleks dan sulit dipecahkan, mencakup serangkaian permasalahan multidimensi mulai dari tahap hulu seperti pengumpulan dan pemilahan yang tidak optimal, hingga proses hilir seperti pengolahan yang minim dan pembuangan akhir yang pada akhirnya mencemari lingkungan, dengan kondisi ini dipicu oleh gabungan faktor kritis, yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem penanganan sampah yang efektif, minimnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat mengenai urgensi praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta kurangnya dukungan dan penegakan kebijakan dari pihak pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi yang transformatif dan efektif.

Kota Cirebon, yang secara fundamental dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa dari perspektif ekonomi regional, juga tidak luput dari tantangan krusial dalam pengelolaan sampah, sebuah isu yang baru-baru ini disoroti media akibat penumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak terangkut dalam jangka waktu memadai, menyebabkan timbunan sampah meluap hingga tumpah ke badan jalan di berbagai lokasi strategis di kota, yang secara langsung menimbulkan keluhan serius dari para pengendara yang terpaksa mencium bau tak sedap yang menyengat dan mengganggu, sehingga harus menutup hidung, sebuah indikasi kuat bahwa insiden serupa berpotensi untuk terulang secara berkelanjutan kecuali jika pola dan sistem pengelolaan sampah yang diterapkan saat ini direformasi dan diimplementasikan secara tepat dan benar.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang masih mengandalkan sistem konvensional 'kumpul-angkut-buang' secara signifikan berkontribusi pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam siklus pengelolaan sampah; kondisi ini diperburuk oleh adanya sistem retribusi pelayanan persampahan, yang justru menumbuhkan rasa ketergantungan kolektif masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memunculkan anggapan bahwa mereka tidak perlu terlibat langsung karena seluruh tanggung jawab pengelolaan sampah sudah

dialihkan dan dibayar kepada pihak otoritas. lebih lanjut, kurangnya upaya sosialisasi yang intensif dan motivasi yang berkelanjutan mengakibatkan nilai-nilai lingkungan tidak tertanam kuat, yang berujung pada rendahnya penghargaan masyarakat untuk menjaga kebersihan, termasuk praktik membuang sampah secara sembarangan, padahal keterlibatan masyarakat merupakan faktor esensial dan mendesak mengingat volume sampah terus meningkat setiap hari, sementara Pemerintah Kota Cirebon dihadapkan pada keterbatasan dana yang menghambat pengadaan dan penggunaan teknologi canggih dalam upaya pengelolaan sampah.

Dalam Perspektif Islam, Lingkungan secara bahasa berasal dari kata “*Ba Wa A*” merupakan seperti dalam lisan arab yaitu berarti tempat kembali.¹ Lingkungan dapat dipahami sebagai ciptaan Allah SWT yang merupakan wadah kehidupan dan amanah bagi manusia, mencakup unsur-unsur abiotik esensial seperti udara, air, dan tanah, serta segala fasilitas yang dibangun oleh manusia, di mana pemeliharannya sangat ditekankan sebagai bagian dari ketaatan; relevan dengan konteks ini, Ilmu Lingkungan (Ekologi), yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, dikembangkan oleh ahli biologi Jerman, Ernest Haeckel, pada tahun 1866 dengan menggabungkan kata *oikos* (hunian atau tempat tinggal) dan *logos* (ilmu), didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dan lingkungan tempat mereka hidup, serta sains yang berkaitan dengan karakteristik iklim, sifat tanah, air, dan udara, yang tidak hanya mengkaji kebersihan, metode, dan alat analisis, tetapi juga menganalisis permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, estetika, ekonomi, dan strategis secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip *khalifah fil ardh* (mandataris di bumi) dalam ajaran Islam. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang lingkungan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 60 :

¹ Saipul Nasution Et Al., “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan,” N.D., 301–22.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Al-Baqarah: 60).

Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua muslim dan muslimat harus melestarikan dan melindungi lingkungan, dan merupakan kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada kita untuk menjaga bumi. Terdapat 3 macam pembagian lingkungan hidup, diantaranya:

1. Lingkungan fisik, mengenai segala sesuatu yang ada disekeliling berupa benda mati.
2. Lingkungan biologis, mengenai segala sesuatu yang ada disekitar termasuk organisme hidup.
3. Lingkungan sosial, mengenai manusia (masyarakat sekitarnya)²

Dalam konteks ajaran Islam ini menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari upaya menyucikan diri, sehingga memilah sampah secara benar merupakan bagian dari amalan yang dianjurkan dalam Islam menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bertanggung jawab merupakan bagian dari amalan yang sangat dianjurkan (*sunnah*) dan memiliki nilai ibadah.

² R. Wahyu Agung Utama Et Al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan *Fiqh al-bi'ah* Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, No. November (2019): 242–59.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan (*mizan*) dan telah menganugerahkan manusia kewenangan sebagai khalifah di bumi (*khalifatullah fil-ardh*) untuk mengelola, memakmurkan, dan melestarikan lingkungan tersebut dengan penuh amanah, bukan merusaknya.

Namun, Allah juga menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab dalam menjalankan peran tersebut. Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam dan menjaga rumah-rumah kita sebagai tempat tinggal yang baik. Dalam konteks memilah sampah, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengelola sumber daya alam dengan baik melalui pemilahan dan daur ulang sampah.³ Memilah sampah secara benar dan terstruktur dalam perspektif fiqih lingkungan (*Fiqh al-bī'ah*) dipandang sebagai suatu tindakan *fardhu kifayah* atau *sunnah muakkadah* yang esensial untuk mewujudkan dan menjaga kebersihan (*taharah*), kesehatan masyarakat (*hifz al-nafs*), dan kelestarian lingkungan alam (*hifz al-bi'ah*).

³ Sekar Harum Pratiwi Et Al., "Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqih," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 7629–42.

Landasan syar'i untuk tindakan ini secara eksplisit berakar pada prinsip-prinsip fundamental yang relevan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (*Hadis*), yang secara kolektif menjadi pedoman perilaku seorang Muslim. Dengan mengimplementasikan pemilahan sampah secara konsisten, kita sejatinya sedang menunaikan amanah (*al-amanah*) yang diemban oleh Allah SWT, yakni peran ganda sebagai hamba-Nya (*'abdullah*) yang patuh dan sebagai pengelola alam (*khalifatullah*) yang bijaksana, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai *maṣlahah 'āmmah*, (kebaikan umum).

Stadion Bima di Kota Cirebon berfungsi sebagai salah satu fasilitas olahraga vital dan ruang terbuka publik yang krusial, di mana kawasan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keolahragaan formal, tetapi juga secara rutin menjadi sentra aktivitas komunal yang beragam bagi masyarakat setempat, mencakup kegiatan rekreasi, sesi senam, hingga menjadi titik utama berkumpulnya pedagang kaki lima (PKL) terorganisir maupun incidental, terutama terlihat peningkatannya pada akhir pekan atau selama penyelenggaraan acara khusus, sehingga tingginya intensitas penggunaan dan keberagaman jenis kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut secara langsung berimplikasi pada peningkatan volume dan variasi komposisi sampah yang signifikan yang dihasilkan oleh kawasan tersebut.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kawasan Stadion Bima telah menjadi isu yang berkelanjutan dan menyoroti beberapa aspek penting. Secara historis, kawasan ini pernah menghadapi kendala terkait kejelasan kepemilikan aset dan tanggung jawab pengelolaan, terutama terkait tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sekitarnya yang sempat menjadi polemik antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, meskipun lokasinya berada di wilayah Kota Cirebon. Ketidakjelasan kewenangan ini sempat menyebabkan penumpukan sampah yang mengganggu pemandangan dan lingkungan sekitar.

Meskipun aset Stadion Bima kini telah dialihkan menjadi milik Pemerintah Kota Cirebon, isu penataan kawasan secara keseluruhan masih

terus bergulir. Salah satu masalah yang muncul adalah keberadaan PKL liar dan bangunan permanen yang tidak sesuai aturan, yang penertibannya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membersihkan sisa-sisa bangunan dan sampah yang ditimbulkan. Selain sampah yang berasal dari kegiatan PKL, tumpukan sampah juga kerap ditemukan di ruas jalan perkantoran di kawasan Bima, yang diduga berasal dari buangan masyarakat yang melintas dan tidak bertanggung jawab.

Sikap dan imbauan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon yang secara spesifik meminta warga agar mengalihkan pembuangan sampahnya ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) terdekat yang resmi (misalnya, TPS di kompleks PLTG) secara jelas mengindikasikan adanya masalah perilaku serius terkait pembuangan sampah sembarangan (*illegal dumping*) di area publik Kawasan Stadion Bima. Imbauan ini menunjukkan bahwa masih banyak individu, termasuk pengguna jalan dan pengunjung kawasan tersebut, yang tidak bertanggung jawab dan memilih membuang sampah mereka secara liar di titik-titik kosong, yang pada akhirnya menimbulkan tumpukan sampah yang mengganggu kebersihan, estetika, dan kesehatan lingkungan di kawasan yang seharusnya menjadi pusat kegiatan public.

Dari segi payung hukum, Kota Cirebon telah memiliki landasan regulasi yang kuat berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.⁴ Perda ini berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek penting dalam manajemen persampahan kota, mencakup (1) kewajiban pengurangan sampah di tingkat sumber, (2) prosedur penanganan sampah yang terstandar, (3) peran serta aktif masyarakat dalam implementasinya, hingga (4) penetapan sanksi administratif atau pidana bagi para pelanggar.

⁴ Setda Kota Cirebon, "Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan," 2018, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/101955/Perda-Kota-Cirebon-No-4-Tahun-2018>.<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/101955/Perda-Kota-Cirebon-No-4-2018>.

Tujuan utama dari implementasi Perda ini adalah mewujudkan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Secara strategis, Perda Nomor 4 tahun 2018 berupaya mendorong perubahan fundamental paradigma pengelolaan sampah di Kota Cirebon, yakni dari model tradisional yang bersifat kumpul-angkut-buang menjadi sistem yang lebih komprehensif, terpadu, dan berwawasan lingkungan yang mengedepankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018, Pemkot Cirebon mengandalkan Perda Pengelolaan Kebersihan yang, dalam penerapannya, dinilai kurang spesifik dan sulit diimplementasikan secara efektif karena sifatnya yang masih terlalu umum. Perda Nomor 4 Tahun 2018 yang baru hadir sebagai penyempurnaan karena tidak hanya mengatur hak dan kewajiban rinci masyarakat sebagai penghasil sampah, tetapi juga secara tegas memuat aturan dan sanksi yang jelas bagi setiap individu atau pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan membuang sampah sembarangan (*illegal dumping*). Selain penegasan sanksi, Perda baru ini juga memiliki fokus jangka panjang, yaitu mengamanatkan pengaturan dan penyusunan rencana induk (*master plan*) serta studi kelayakan komprehensif untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Permasalahan pengelolaan sampah bersifat multidimensi dan tidak akan pernah dapat diselesaikan secara tuntas jika hanya bertumpu pada upaya pemerintah saja, tanpa adanya keterlibatan dan tanggung jawab dari masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Oleh karena itu, inisiatif seperti kehadiran bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh warga masyarakat menjadi salah satu strategi kunci untuk secara efektif melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan dan penanganan timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Meskipun Kota Cirebon telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia, kota ini, layaknya kota-kota besar lainnya, menghadapi

tantangan serius dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di tingkat operasional harian. Permasalahan yang kerap muncul adalah penumpukan volume sampah yang berlebihan di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang seringkali gagal terangkut sesuai jadwal dan tepat waktu.

Akibatnya, tumpukan sampah ini sering meluber hingga menutupi badan jalan, menimbulkan bau tidak sedap (*polusi udara*) yang sangat mengganggu kenyamanan, estetika, dan potensi kesehatan masyarakat, terutama bagi para pengguna jalan. Kejadian berulang ini merupakan indikasi kuat adanya kelemahan struktural dalam seluruh pola pengelolaan sampah Kota Cirebon, mulai dari aspek pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Jika tidak segera dilakukan evaluasi dan perbaikan komprehensif pada sistem operasional tersebut, permasalahan penumpukan dan pencemaran sampah diperkirakan akan terus berlanjut dan menjadi krisis lingkungan yang kronis.

Partisipasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan partisipasi tingkat tinggi karena atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat (*bottom up*), dimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Peran pihak-pihak eksternal hanya memberikan stimulus/dukungan sesuai kebutuhan yang diputuskan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat ada dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah, mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil program.⁵

Berdasarkan pada uraian diatas maka tulisan ini membahas beberapa point. Pertama, kondisi pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang akan dilihat dari kecenderungan masyarakat dalam membuang sampah. Serta

⁵ Yuni Puspitawati And Mardwi Rahdriawan, "Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dengan Konsep 3r (Reduce , Reuse , Recycle) Di Kelurahan Larangan Kota Cirebon," Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota 8, No. 4 (2012): 349–59.

Ketiga, mengenai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, penanganan sampah yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya untuk mencapai hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan solusi teknologi yang inovatif. Tujuan dari pengelolaan sampah ini adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Rumusan masalah memiliki fungsi esensial sebagai wadah dan kerangka kerja yang memaparkan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan kunci yang menjadi fokus utama dan acuan mendalam dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya termasuk tantangan operasional, isu kewenangan, dan perilaku masyarakat di Kota Cirebon maka rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan substantif berikut

1. Identifikasi Masalah

Peneliti ini mengkaji dan menganalisis terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.4 Tahun 2018 (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima). Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berupa fenomena-fenomena yang terjadi di Masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Dalam Batasan masalah ini penulis membatasi masalah yang di teliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang di bahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Dalam batasan masalah ini juga penulis akan melakukan studi lapangan berupa wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Pedagang yang berada di Shelter Bima dengan membatasi penelitian dan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada implementasi dari penyelesaian pengelolaan sampah yang bermasalah dan tinjauan hukum dari masalah tersebut. Maka dari itu penulis penulis ingin menghasilkan suatu kajian dari hal tersebut

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok masalah tersebut adalah :

- a. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di sekitar Stadion Bima?
- b. Bagaimana Implementasi Pengelolaan sampah di sekitar Stadion Bima dalam perspektif Peraturan Daerah (PERDA) No.4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah?
- c. Bagaimana Perspektif Fiqih Al-Bi'ah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.4 Tahun 2018. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana DLH dapat meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya sampah di lingkungan sekitar

khususnya yang berkaitan dengan Pedagang yang di shelter dan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di sekitar Stadion Bima.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan sampah di sekitar Stadion Bima dalam perspektif Peraturan Daerah (PERDA) No.4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Al-Bi'ah Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi Secara Praktis bagi penulis terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di jadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan

informasi bagi penulis dan pembacanya terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon.

b. Bagi pihak terkait

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon. Serta memberikan hal positif pemahaman terhadap kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar berdasarkan PERDA No.4 Tahun 2018.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur bagi kepustakaan oleh para peneliti selanjutnya agar dapat mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon yang dapat di jadikan sebagai bahan acuan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa judul skripsi yang membahas tentang pengelolaan sampah yang sedikit bersinggungan dengan pengamatan penelitian penulis, Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Prihatin, Rohani Budi dalam jurnalnya yang berjudul "Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi

Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta." Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di kedua kota masih bergantung pada koordinasi antar pelaku institusi, dengan kendala kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan; partisipasi publik masih terbatas, sehingga pengaruh kebijakan terhadap kesadaran lingkungan belum optimal. Pengelolaan sampah di Kota Cirebon dan Kota Surakarta masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Artinya, pengelolaan sampah di kedua kota tersebut dilakukan dengan dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian diangkut secepat-cepatnya, dan setelah itu dibuang sejauh-jauhnya. Pola tersebut menyebabkan sampah di kedua kota akan timbul lebih cepat ketimbang solusi pengelolaan sampah. Akibatnya, TPA di kedua kota itu sudah tidak mampu lagi memberikan daya dukungnya. Paradigma lama pengelolaan sampah yang hanya berupa kumpul-angkut-buang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan sampah bertumpuk di TPA. Padahal semakin lama, lahan di perkotaan yang akan digunakan untuk TPA semakin terbatas, langka, dan tentu akan sangat mahal. Kendala lain yang dihadapi kedua kota tersebut adalah susahny mencari lahan pengganti TPA sehingga sangat bergantung pada keberadaan lahan di wilayah lain. Selanjutnya perlu ada perencanaan yang matang terkait dengan upaya revitalisasi TPA, mempercepat realisasi pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, serta sosialisasi dan edukasi terus-menerus agar masyarakat mulai sadar pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program pengelolaan sampah berbasis komunitas.⁶

Sekdua, jurnal yang di tulis oleh Windanastiti, S. Dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan dan Perilaku Pedagang dalam Mengelola Sampah di Pasar Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Dalam jurnal tersebut menjelaskan Peran DLH dan pengelola

⁶ Rohani Budi Prihatin, "Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang : Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan Kota Surakarta," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | 11, No. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.22212/Aspirasi.V11i1.1505>.

pasar terkait implementasi kebijakan lingkungan masih dipengaruhi oleh kemampuan infrastruktur serta kesadaran pedagang; faktor perilaku pedagang dan kepatuhan terhadap aturan kebersihan berperan besar terhadap keberhasilan program lingkungan di ruang komersial publik yang memberikan pembelajaran mengenai bagaimana perilaku pedagang di ruang publik mempengaruhi kesadaran lingkungan dan kepatuhan terhadap PERDA; relevan untuk analogi studi di sekitar stadion berpotensi melibatkan pedagang dan pengunjung.⁷

Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windanastiti dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Pasar Kamulan sudah berjalan dengan baik. Namun, peraturan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan pasar masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, secara keseluruhan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pasar Kamulan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012. Dari keenam kegiatan pengelolaan sampah ketidaksesuaian terletak pada kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Sedangkan perilaku dan peran pedagang pasar dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sejauh ini pedagang sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar iuran kepada pengelola pasar sebagai tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan. Meskipun demikian terdapat pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan meninggalkan sampahnya di lokasi berjualan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ridayati, D. dan Yunastiawan, A. Dalam jurnalnya yang berjudul "Penggunaan PLUM Model dalam Analisis Pengaruh Faktor Pengetahuan terhadap Attitude dan Praktek Pengolahan Sampah Berbasis 3R" dalam jurnal ini menjelaskan Peningkatan pengetahuan

⁷ Agista Windanastiti And Agung Kurniawan, "Analisis Sistem Pengelolaan Dan Perilaku Pedagang Dalam Mengelola Sampah Di Pasar Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek," *Sport Science And Health* 3, No. 12 (2021): 961–75, <https://doi.org/10.17977/Um062v3i122021p961-975>.

terkait 3R berkorelasi positif dengan sikap dan praktik pengolahan sampah, mengindikasikan pentingnya edukasi sebagai pendorong perilaku ramah lingkungan di komunitas perkotaan.⁸ Dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan PLUM untuk menganalisis keterkaitan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan PLUM untuk menganalisis keterkaitan antara faktor pengetahuan dengan faktor attitude dan praktek di dalam implementasi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara aspek pengetahuan dengan attitude dan praktek masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R. Merujuk pada hasil ini, maka pemerintah selaku pemangku kepentingan perlu untuk secara gencar memasyarakatkan penerapan konsep 3R pada pengelolaan sampah rumah tangga.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anugerah, A. Dalam jurnalnya yang berjudul "Studi Pendahuluan: Konstruksi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru 2012–2014" Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan Gambaran rancangan kebijakan, cakupan pelayanan, serta kendala adaptasi kebijakan terhadap realita operasional di kota; menyoroti pentingnya evaluasi implementasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan partisipasi publik.⁹ Pengelolaan sampah dilakukan hanya setelah sampah ditimbulkan hal tersebut sangat bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga dalam hal ini perlu adanya pelibatan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari modal sosial strategis dalam meninjau ulang kembali kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini didominasi pihak pemerintah saja.

⁸ Ridayati And A. Yunastiawan, "Penggunaan Plum Model Dalam Analisis Pengaruh Faktor Pengetahuan Terhadap Attitude Dan Praktek Pengolahan Sampah Berbasis 3r," *Kurvatek* 7, No. 2 (2022): 127–32, <https://doi.org/10.33579/Krvtk.V7i2.3572>.

⁹ Muhammad Fajar Anugerah Et Al., "Studi Pendahuluan: Konstruksi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru 2012-2014," *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 3, No. 2 (2020): 115–32.

Kemudian juga diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Kota Pekanbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan masyarakat mengenai urgensi konsep dasar dan konsep hierarki Pengelolaan sampah yang wajib diacu dan diakomodasi dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan. Pada penguatan fungsi regulasi, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat merumuskan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dan menyediakan bahan-bahan hukum untuk menjalankan kewenangan dan ruang lingkup dalam kebijakan Pengelolaan sampah. Masyarakat luas dan dunia usaha di Indonesia diposisikan mempunyai kedaulatan yang sama pentingnya dengan pemerintah, sehingga harus ikut berperan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah. Pembenahan teknis pengelolaan sampah yakni dengan upayamengantisipasi sistem pengelolaan sampah pada masa yang akan datang dengan upaya preventif, yaitu pengurangan sampah di sumbernya. Dengan adanya kajian awal mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini tentunya dapat memberikan gambaran idepeta analisis kebijakan pengelolaan sampah yang merujuk pada paradigma transformasi kebijakan dengan basis konsep kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi.

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Okhtafianny, N. dan Ariani, N. Dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh". Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan Kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Payakumbuh mencakup kapasitas institusional, kepatuhan pelaku usaha, kurangnya partisipasi publik, serta kebutuhan adaptasi kebijakan terhadap konteks setempat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh dengan menggunakan perspektif Teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kota Payakumbuh masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Sosialisasi yang terlaksana hanya pada saat keluarnya Peraturan Daerah (Perda) saja, namun masih kurang dalam aspek transmisi dan konsistensi.

Pengiriman informasi ke tingkat kecamatan dan kelurahan kurang berjalan baik, dan informasi yang disampaikan tidak selalu konsisten terhadap waktu pelaksanaan. Hal ini menyebabkan terjadi distorsi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Kemudian Faktor sumber daya manusia pada DLH Kota Payakumbuh belum sesuai dengan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan. Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di DLH tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Kondisi keuangan daerah yang belum memadai menyebabkan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah masih kurang memadai.¹⁰

Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa Semua studi menempatkan pengelolaan sampah sebagai fokus utama serta menekankan peran pemerintah daerah (DLH) dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan program lingkungan, Metode kualitatif maupun kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan evaluasi kebijakan daerah umum digunakan untuk memahami dinamika kebijakan, implementasi, serta persepsi publik terkait pengelolaan sampah. Edukasi lingkungan sebagai penggerak utama perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran tercatat sebagai temuan umum yang relevan dengan upaya peningkatan kesadaran di lingkungan publik sekitar stadion.

Keenam, Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini adalah skripsi yang ditulis oleh Fahmu Rizki (2022) berjudul “Peran Dinas

¹⁰ Tiwi Okhtafianny And Ria Ariani, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 3 (2023): 537–50.

Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Fahmu melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak DLH serta masyarakat setempat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DLH Aceh Tengah telah menjalankan peran pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan penyediaan fasilitas TPS, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sarana serta rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dan fokus pada persoalan pengelolaan sampah berbasis kebijakan daerah. Adapun perbedaannya, penelitian Fahmu berfokus pada pengelolaan sampah secara umum di wilayah kabupaten, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji peningkatan kesadaran masyarakat di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon serta mengaitkannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 serta tinjauan *fiqh* siyasah. Dengan demikian, penelitian Fahmu menjadi rujukan penting untuk memahami pola peran DLH, tetapi penelitian yang dilakukan ini memberikan ruang kontribusi baru dari aspek lokasi, fokus masalah, dan pendekatan normatif keislaman.

Ketujuh, Penelitian terdahulu yang juga relevan adalah skripsi karya Muhammad Kholil (2023) berjudul “Etika Birokrasi dalam Praktik Lobi (Studi Kasus Pada Fraud Tender/Tunjangan Tambahan Penghasilan di Kabupaten Lampung Timur)”.¹¹ Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana praktik lobi dalam birokrasi dapat melahirkan penyimpangan etika, khususnya terkait fraud tender dan Tunjangan Tambahan Penghasilan

¹¹ Fahmu Rizki Et Al., “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah,” 2022.

(TTP) di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mengungkap pola penyalahgunaan wewenang serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya praktik tidak etis dalam birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, budaya birokrasi yang permisif, dan kepentingan individu maupun kelompok menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya fraud dalam proses tender dan pengelolaan TTP. Secara tematik, penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji peran lembaga pemerintah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam konteks etika birokrasi dan pelayanan publik.

Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian Kholil berfokus pada penyimpangan etika dan praktik lobi dalam birokrasi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon, serta mengaitkannya dengan implementasi kebijakan daerah dan perspektif *fiqh* siyasah. Dengan demikian, penelitian Muhammad Kholil memberikan landasan teoretis mengenai etika birokrasi dan implementasi kebijakan, namun penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui kajian perilaku masyarakat, efektivitas program DLH, dan pendekatan normatif keislaman.

Kedelapan, Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan adalah skripsi karya Zuhaira Fitri (2022) yang berjudul “Penerapan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PDAM pada Masyarakat Sionom Hudon Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam.”¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi aturan daerah mengenai kewajiban pembayaran jasa air PDAM serta menilai

¹² Muhammad Kholil, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (2015).

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis melakukan wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen untuk menilai efektivitas penerapan Perda serta respons masyarakat terhadap kewajiban yang diatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda masih belum optimal karena rendahnya kepatuhan masyarakat, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta adanya kendala teknis dalam layanan PDAM.

Secara substantif, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi peraturan daerah serta melihat peran pemerintah dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Namun, penelitian Zuhaira berfokus pada regulasi layanan air bersih dan analisis ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah di Stadion Bima Kota Cirebon, serta mengaitkannya dengan Perda Pengelolaan Sampah Nomor 4 Tahun 2018 dan perspektif *fiqh* siyasah. Dengan demikian, penelitian Zuhaira memberikan landasan mengenai pola implementasi Perda dan hubungan antara kebijakan daerah dan perilaku masyarakat, sementara penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui fokus isu lingkungan, kesadaran publik, dan kajian normatif keislaman.

Kesembilan, Berdasarkan hasil telaah terhadap skripsi Resmi Ulfa Sari (2022) berjudul “Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Ditinjau dari Kajian *Fiqh* Siyasah)”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, dan menganalisisnya

¹³ Zuhaira Fitri, “Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Skripsi Oleh : Zuhaira Fitri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Sei Berombang Kecamatan Panai Hili,” 2024.

dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian menggunakan pendekatan empiris/lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta didukung data hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016. Temuan utama menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah belum berjalan optimal; sampah hanya diangkut hingga tempat pembuangan akhir tanpa proses lanjutan dan masih terjadi pembuangan sampah ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran serta penyakit. Selain itu, terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas, dan tidak adanya pengelolaan lanjutan di TPA. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu ini memiliki persamaan pada fokus tematik terkait pengelolaan sampah serta peran pemerintah/dinas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi memiliki perbedaan pada ruang lingkup lokasi, perspektif analisis (menggunakan *fiqh siyasah*), serta variabel kajian. Dengan demikian, skripsi ini dapat dijadikan dasar konseptual untuk memperkuat urgensi dan posisi penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam memahami hambatan struktural, kebijakan daerah, serta implementasi pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Kesepuluh. Berdasarkan hasil telaah terhadap skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kecamatan Tenggarong”¹⁴ karya Nuraini (2021) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dijalankan oleh pemerintah kecamatan, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Temuan utama memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal, ditandai oleh

¹⁴ Rasmi Ulfa Sar, “Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Kumbang Indah Kecamatan” (2022).

kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah, serta koordinasi yang belum efektif antara pemerintah dan petugas lapangan. Selain itu, mekanisme pengangkutan dan pengelolaan akhir sampah masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa persamaan pada aspek fokus kajian, yaitu sama-sama menyoroti pengelolaan sampah sebagai bagian dari pelayanan publik dan melihat peran pemerintah dalam implementasi kebijakan. Namun, terdapat perbedaan pada ruang lingkup wilayah penelitian, variabel yang dianalisis, serta pendekatan teoritis yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi penting untuk memperkuat landasan empiris dan metodologis penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah bekerja di tingkat lokal serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu ketentuan metodologis yang diterima secara umum dalam konteks ilmiah, di mana ia berfungsi sebagai panduan konseptual untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, serta menegaskan lingkup dan batasan penelitian. Kerangka ini ditampilkan secara eksplisit dalam penelitian untuk menyediakan batas yang jelas mengenai area Fokus dan target penyelesaian masalah yang akan dicapai.

Lebih dari sekadar batasan, kerangka pemikiran juga merupakan bagian integral dari tinjauan pustaka, karena di dalamnya terkandung rangkuman terstruktur dari seluruh dasar teori dan konsep kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, kerangka pemikiran juga menjelaskan skema singkat tentang proses logis penelitian yang akan dilakukan, mulai dari input hingga output yang diharapkan. Pada intinya, tujuan utama penyusunan kerangka pemikiran adalah untuk mempermudah dan menertibkan proses penelitian, memastikan bahwa setiap tahapan berjalan secara sistematis dan

tetap sesuai dengan tujuan, tinjauan teoretis, dan kerangka konseptual yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, dan pengelolaan sampah adalah proses mengelola sampah tersebut melalui pengurangan, pemanfaatan kembali, pendaurulangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir secara aman ke media lingkungan. Penelitian mengenai strategi menurut Kurniati strategi pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah anorganik dan sampah organik. Pada sampah anorganik akan di daur ulang sedangkan sampah organik dibuat pupuk dan bioenergi.

Sedangkan, menurut Atriningsih, strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dilakukan dengan konsep 3R yaitu *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Sedangkan, menurut Sumarto menyatakan strategi mempercepat proses pengomposan dapat dipercepat dengan beberapa strategi. Secara umum strategi untuk mempercepat proses pengomposan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: memanipulasi kondisi/faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pengomposan, menambahkan organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan seperti mikroba pendegradasi bahan organik dan vermikompos (cacing) dan menggabungkan strategi pertama dan kedua.¹⁵

¹⁵ Nahara Hari Sakti, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai," *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* (2019).

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Persoalan pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan sampah yang pada pelaksanaan Perda ini masih menemui berbagai kendala, terutama pada tingkat kelurahan seperti di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan banyak keluhan dari masyarakat tentang TPS di Jl. Evakuasi yang belum maksimal dan mengganggu lalu lintas. Ungkapan dari Sukmawijaya pada Musyawarah Pembangunan Kelurahan (MUSBANGKEL).

Penelitian Penelitian ilmiah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kerangka berpikir yang sistematis dan logis. Kerangka berpikir berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu peneliti dalam menuntun arah penelitian agar tetap terarah pada tujuan dan permasalahan yang hendak dikaji. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan fenomena hukum yang diteliti secara runtut dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun penelitian ini adalah untuk lebih dalam lagi meneliti tentang meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat tentang pengelolaan sampah Di Sekitar Stadion Bima berdasarkan PERDA No.4 Tahun 2018. Terutama dalam menangani kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berada Di Sekitar Stadion Bima. Dan berikut bagan yang penulis susun.

UNISSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CIREBON
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Kata “Metode” dalam Bahasa Yunani yaitu “*methodos*” dan dalam Bahasa Inggris “*methode*” maksudnya adalah “cara atau jalan”. Metode adalah cara atau Teknik yang digunakan untuk riset.¹⁶ Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian dimana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistimatis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk

¹⁶ Dermawan, Lahming, And Moh. Ahsan S. Mandra, “Kajian Strategi Pengelolaan Sampah,” *Unm Environmental Journals* 1, No. 18 (2018): 86–90.

menunjukkan jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Sedangkan Penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis yang di tujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan metode penelitian adalah cara strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang di perlukan, metode penelitian perlu di bedakan dari Teknik pengumpulan data yang merupakan Teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sedangkan pengertian metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang di gunakan dalam penelitian tersebut. Sedangkan metodologi adalah metode ilmiah yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang memfokuskan kajian pada hubungan antara hukum, pemerintah, dan realitas sosial masyarakat sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena masalah pengelolaan sampah di sekitar Stadion Bima Kota Cirebon bukan hanya terkait ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, tetapi juga berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat, tingkat kesadaran lingkungan, serta efektivitas peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini berusaha memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana masyarakat merespons aturan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara lebih komprehensif, karena tidak hanya menilai

rumusan kebijakan dan peraturan, tetapi juga menelaah kondisi lapangan melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan DLH, pedagang, serta masyarakat sekitar Stadion Bima. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memberikan dasar metodologis yang tepat untuk menghasilkan analisis yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan karakteristik serta tujuan penelitian, khususnya dalam menilai peran DLH dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan efektivitas implementasi Perda No. 4 Tahun 2018.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang memiliki pengembangan teori disertai dengan pengumpulan data-data, seperti dokumen dan informasi tentang objek penelitian tersebut yang akan di teliti. Penelitian kualitatif ini dapat disebut dengan penelitian naturalistik yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi apa adanya (alamiah). Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode pada pembuatan yang menjelaskan, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Stadion Bima Kota Cirebon sudah sesuai berdasarkan PERDA No.4 Tahun 2018. oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana kewenangan DLH terhadap Pengelolaan Sampah Di Stadion Bima Kota Cirebon.

¹⁷ S.S.M.S. Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Kencana, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=Gi9adwaaqbaj.Hlm.48>

3. Sumber Data Penelitian

Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini berupa data yang di peroleh dari sumber tertulis dan wawancara Lembaga. Di antaranya adalah wawancara, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian ini. Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada Lembaga Dinas Lingkungan Hidup, sehingga bisa memberikan keterangan secara jelas dan nyata mengenai kasus yang ada di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung, dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain berasal dari buku, referensi, jurnal penelitian ataupun lewat dokumen yang dimana hal tersebut relevan dengan topik yang akan diangkat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sumber data yang di gunakan untuk menunjang sumber data primer di antaranya adalah peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer (*Perimer Law Material*) yaitu bersumber pada bahan hukum yang di peroleh secara langsung dan di pergunakan dalam penelitian ini, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

- 2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier ini merupakan berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya. Data yang ada dalam peneitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan di pergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga di harapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan berdasarkan prinsip ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menentukan fasilitas data dan kualitas penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, dan bahan pustakaan yang merupakan awal dari setiap penelitian. Wawancara dan pustaka bagi peneliti meliputi sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier yang berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah.. Setiap sumber ini penulis harus memeriksa ulang validalitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat mnentukan hasil suatu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu suatu metode penalaran yang berangkat dari fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Dalam konteks penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan dan mengkaji berbagai data empiris yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah di sekitar Stadion Bima. Data tersebut dapat berupa hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi yang relevan.

Data-data khusus tersebut dianalisis secara sistematis dengan cara mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik generalisasi atau kesimpulan umum mengenai bagaimana peran DLH dalam pengelolaan sampah serta sejauh mana implementasinya jika ditinjau dari perspektif *Fiqh al-bī'ah*.

Pendekatan induktif ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan realitas empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih akurat dan relevan terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dalam perspektif Islam.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2018 (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima)”. Dan untuk lebih mempermudah memahami terhadap permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini, maka di susun sistematika pembahasan secara utuh dan

sistematis yang terdiri dari lima BAB, dan masing-masing BAB tersusun dari beberapa sub BAB. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar singkat beberapa masalah penelitian, yaitu. latar belakang masalah desain, masalah mengidentifikasi masalah dan juga membatasi masalah pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat bagi ilmuwan, peneliti dan lembaga penelitian, pelajaran sebelumnya kerangka, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, alat penelitian dan teknik analisis data, dan menulis secara sistematis.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature dan review penelitian terdahulu beserta teori Penerapan pembiayaan bermasalah yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III: TINJAUAN PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan temuan lapangan berisi deskripsi data yang berkenaan dengan variable yang di temukan secara objektif.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dengan lengkap dan pembahasannya. Pada bab IV penulis akan membahas mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.4 Tahun 2018 (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di Sekitar Stadion Bima).

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis atau pembahasan.